

EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KUTA KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH

Lalu Aksar Hadi ¹⁾, Ika Devy Pramudiana ²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: aksarlalu2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dalam pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori Evaluasi Kebijakan Publik menurut William Dunn yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis melalui pengumpulan, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alokasi Dana Desa di Desa Kuta belum sepenuhnya efektif dan efisien, dengan beberapa program pembangunan yang tidak mencakup semua kebutuhan desa. Faktor pendukungnya adalah peran ITDC sebagai pengelola wisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dukungan sebagian masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga terkait, birokrasi yang terhambat kepentingan pribadi, serta dampak pandemi COVID-19 yang mengalihkan dana untuk bantuan langsung tunai. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan koordinasi, pengelolaan dana desa yang lebih transparan, dan penyesuaian kebijakan agar dapat lebih merata dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Evaluasi Kebijakan, Pembangunan Desa

Abstract

This study aims to analyze the government policy of Kuta Village, Pujut Subdistrict, Central Lombok Regency, in the allocation of Village Funds for development, as well as the supporting and inhibiting factors involved. The study employs a qualitative descriptive approach using William Dunn's Public Policy Evaluation theory, which includes six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Data were collected through observation, interviews, and document studies and analyzed using data collection, condensation, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Village Fund allocation policy in Kuta Village has not been entirely effective or efficient, with several development programs failing to address all village needs. Supporting factors include the role of ITDC as a tourism manager in the Special Economic Zone (SEZ) and partial support from the community. Inhibiting factors involve a lack of coordination between the village government and related institutions, bureaucracy hampered by personal interests, and the impact of the COVID-19 pandemic, which redirected funds toward direct cash assistance. The implications of this study highlight the need for improved coordination, more transparent management of Village Funds, and policy adjustments to ensure equitable and targeted development.

Keywords: Village Fund Allocation, Policy Evaluation, Village Development

LATAR BELAKANG

Desa merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat, tetapi juga pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam sistem pemerintahan, desa memiliki otonomi tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber dayanya secara mandiri, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dana Desa (DD), yang diperkenalkan pada tahun 2015, merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dialokasikan secara langsung ke rekening desa, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Pada Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, implementasi Dana Desa menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Meski memiliki potensi besar sebagai salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat, desa ini menghadapi kendala dalam memaksimalkan manfaat Dana Desa. Keterbatasan kapasitas perangkat desa, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini.

Rendahnya kapasitas perangkat desa sering kali berdampak pada buruknya perencanaan dan pengelolaan Dana Desa. Beberapa program pembangunan yang

dirancang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang dikeluarkan tidak memberikan dampak signifikan. Selain itu, kelemahan dalam pengelolaan administrasi juga menjadi kendala, seperti laporan keuangan yang tidak sesuai standar, yang akhirnya menghambat pencairan dana tahap berikutnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan.

Masalah lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Musyawarah Desa (Musdes), yang seharusnya menjadi forum untuk menyerap aspirasi masyarakat, sering kali hanya melibatkan segelintir pihak. Hal ini menyebabkan program-program pembangunan yang dirancang kurang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa. Partisipasi masyarakat yang rendah juga dipengaruhi oleh kurangnya transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait alokasi dan penggunaan Dana Desa.

Selain itu, pandemi COVID-19 membawa tantangan baru dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagian besar alokasi dana selama masa pandemi difokuskan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak, sehingga anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi terbatas. Meskipun langkah ini diperlukan, namun hal ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan Dana Desa agar mampu beradaptasi dengan situasi darurat.

Desa Kuta juga menghadapi tantangan dalam memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan. Sebagai desa wisata yang terkenal dengan keindahan pantainya, potensi pariwisata seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun, kurangnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha wisata menjadi kendala dalam pengembangan sektor ini. Dana Desa yang seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur pendukung pariwisata justru sering kali

dialokasikan untuk program yang kurang strategis.

Di sisi lain, implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kuta menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan antara masyarakat desa yang tinggal di wilayah pesisir dan pedalaman. Masyarakat pesisir lebih membutuhkan akses terhadap infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan menuju lokasi wisata, sedangkan masyarakat pedalaman lebih membutuhkan akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih dan listrik. Perbedaan kebutuhan ini menuntut pemerintah desa untuk lebih bijak dalam menetapkan prioritas alokasi Dana Desa.

Evaluasi terhadap kebijakan Dana Desa menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik, penelitian ini akan menganalisis efektivitas, efisiensi, dan ketepatan implementasi Dana Desa di Desa Kuta. Evaluasi ini juga akan mencakup analisis terhadap partisipasi masyarakat, kapasitas perangkat desa, serta pengaruh kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa, tetapi juga pada kontribusinya dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Pemerintah daerah dan pusat dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menyusun strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat menjadi instrumen yang benar-benar mendukung pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah desa di Desa Kuta. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kebijakan publik terkait pengelolaan Dana Desa, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik lokal yang unik seperti Desa Kuta.

LANDASAN TEORITIS

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan upaya strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih mandiri dan terfokus (Suyanto, 2023). Penggunaan dana desa diarahkan untuk mendanai program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Hutagalung, 2022).

Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan langsung kepada pemerintah desa melalui transfer ke rekening kas desa. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum utama pengelolaan desa di Indonesia. Dana desa difokuskan pada tiga aspek utama:

1. **Pembangunan Infrastruktur:** Misalnya, pembangunan jalan, irigasi, pasar desa, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat desa terhadap layanan publik.
2. **Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial:** Contohnya adalah program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha bagi kelompok produktif, dan pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, kerajinan, atau pariwisata desa.
3. **Pelayanan Dasar Masyarakat:** Dana desa juga digunakan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan melalui program-program yang langsung berdampak pada masyarakat.

Namun, pengelolaan dana desa menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, risiko korupsi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Secara keseluruhan, alokasi dana desa

merupakan instrumen strategis dalam membangun kemandirian desa dan memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah langkah terstruktur untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, evaluasi memperhatikan efisiensi (penggunaan sumber daya yang optimal), relevansi (kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat), dan keberlanjutan (kemampuan kebijakan untuk tetap berjalan dalam jangka panjang). Lebih dari sekadar melihat hasil akhir, evaluasi juga bertujuan untuk menemukan kendala atau hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya evaluasi yang baik, pengambil kebijakan dapat membuat keputusan berdasarkan data yang valid, sehingga kebijakan di masa depan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, evaluasi kebijakan harus menyesuaikan pendekatannya dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya wilayah yang menjadi sasaran kebijakan. Pendekatan kuantitatif berguna untuk mengukur hasil kebijakan secara angka, seperti persentase keberhasilan atau statistik dampak. Sementara itu, pendekatan kualitatif fokus pada pengalaman dan persepsi para pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan evaluasi menghasilkan analisis yang holistik.

Namun, pelaksanaan evaluasi sering dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti terbatasnya data yang tersedia, kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang terlibat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerangka evaluasi yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat, serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Evaluasi yang efektif tidak hanya meningkatkan akuntabilitas kebijakan, tetapi juga memungkinkan kebijakan tersebut terus

berkembang agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, dan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas pemerintah desa, dan pengelolaan sumber daya secara efektif (Hidayat, 2023). Sutrisno (2022) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan desa yang berhasil, perlu adanya perencanaan yang matang dan keterlibatan aktif masyarakat desa di setiap tahapan, agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan setempat dan bukan sekadar kebijakan yang diterapkan dari atas tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Di Indonesia, pembangunan desa merupakan bagian penting dari upaya mengurangi ketimpangan antara desa dan kota (Indriani, 2024). Melalui kebijakan seperti Dana Desa, pemerintah memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola anggaran pembangunan, yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Wulandari (2023) menambahkan bahwa untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar memberikan dampak positif jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan yang berfokus pada potensi lokal sangat penting untuk menciptakan pembangunan desa yang adil dan inklusif.

Selain itu, pembangunan desa juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Rahman (2025) mengungkapkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya secara mandiri, sehingga tidak hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat. Fajar (2023) menekankan

bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kebijakan alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan analisis terhadap fenomena yang kompleks dengan mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik oleh William Dunn. Teori ini mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mencakup tiga hal, diantaranya:

1. Mengkaji kebijakan alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Kuta dalam pelaksanaan pembangunan, mencakup perencanaan, implementasi, dan hasilnya.
2. Menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kecukupan kebijakan tersebut berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan alokasi Dana Desa.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Desa Kuta sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dikelola oleh ITDC, serta tantangan yang

dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuta

Pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Kuta telah direncanakan melalui dua instrumen perencanaan utama, yaitu RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Kedua dokumen tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Desa Kuta dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kuta pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 732.094.000 telah dialokasikan untuk beberapa kegiatan pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan seperti pembuatan jembatan, rabat jalan, serta saluran irigasi. Namun, meskipun telah diarahkan untuk kegiatan tersebut, hasil implementasi pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan.

Salah satu contoh yang mencerminkan hal ini adalah pembangunan jembatan di Dusun Mong yang baru mencapai 40% pada tahap pertama. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif dalam beberapa kegiatan lain, seperti rabat jalan di Dusun Mengalung yang telah mencapai 100% pada tahap pertama. Namun, pencapaian tersebut masih belum mampu menjawab semua kebutuhan infrastruktur yang diinginkan oleh masyarakat Desa Kuta. Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan adalah masalah koordinasi yang buruk antara pihak pemerintah desa, masyarakat, dan ITDC sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus di Desa Kuta. Koordinasi yang kurang efektif menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan

tertunda, dan sebagian lainnya bahkan belum dilaksanakan dengan baik.

Selain masalah koordinasi, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa. Masyarakat di Desa Kuta, meskipun terlibat dalam beberapa tahapan pembangunan, kurang aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Hal ini menyebabkan beberapa proyek yang sudah direncanakan tidak terlaksana dengan baik, dan penggunaan dana desa belum optimal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pada akhirnya, penggunaan dana desa yang tidak efisien berdampak pada terbatasnya manfaat yang diterima oleh masyarakat Desa Kuta.

Masalah lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam menjalankan proyek pembangunan. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Kuta terbatas, dan ini turut mempengaruhi efektivitas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana desa dan terhambatnya pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa lebih memperhatikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di masa depan.

Efektivitas dan Kecukupan Pembangunan di Desa Kuta

Dalam hal efektivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Kuta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Beberapa proyek yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2022 masih mengalami penundaan yang signifikan, seperti pembuatan jembatan di Dusun Mong dan pengaspalan jalan setapak yang belum selesai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara berbagai pihak

yang terlibat dalam pembangunan, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan perencanaan. Efektivitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait seperti ITDC. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat koordinasi dengan semua pihak untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Selain masalah koordinasi, kecukupan pembangunan di Desa Kuta juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Kecukupan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, kecukupan pembangunan di Desa Kuta masih belum optimal. Meskipun sejumlah kegiatan pembangunan, seperti rabat jalan dan pembuatan saluran irigasi, sudah dilaksanakan, proyek-proyek yang lebih besar, seperti pembuatan jembatan dan sumur bor, mengalami penundaan dan belum tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang tersedia sudah cukup besar, faktor eksternal seperti kurangnya koordinasi dan masalah komunikasi menyebabkan ketidaktercapaian kecukupan yang diinginkan.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat Desa Kuta yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Beberapa proyek yang telah selesai, seperti rabat jalan di Dusun Mengalung, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama yang berada di daerah yang kurang mendapat perhatian dalam perencanaan. Oleh karena itu, kecukupan pembangunan di Desa Kuta sangat bergantung pada perencanaan yang lebih matang, dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam tahap perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Kendala dalam mencapai kecukupan ini juga terkait dengan faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi anggaran dan alokasi dana desa. Sebagian besar dana desa digunakan untuk

program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Akibatnya, anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas, sehingga beberapa proyek pembangunan harus tertunda atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Oleh karena itu, untuk mencapai kecukupan pembangunan yang optimal, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terkait dengan penggunaan dana desa, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi ini.

Responsivitas dan Faktor Pendukung serta Penghambat dalam Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, responsivitas Pemerintah Desa Kuta terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan cukup baik, meskipun masih ada banyak kendala yang perlu diatasi. Masyarakat menyambut baik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, seperti alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Namun, meskipun kebijakan ini diterima dengan baik, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa dan keterbatasan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa proyek pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi dan pengawasan dari masyarakat.

Dalam hal faktor pendukung, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuta cukup baik. Pemerintah desa telah melakukan pelaporan yang cukup transparan mengenai penggunaan dana desa dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada di kantor desa juga memadai untuk mendukung proses evaluasi kebijakan. Penggunaan alat-alat kantor dan teknologi informasi yang ada di desa turut mempermudah proses penyusunan laporan dan evaluasi kebijakan. Namun, meskipun terdapat beberapa faktor pendukung, terdapat juga sejumlah

penghambat yang mengurangi efektivitas evaluasi kebijakan alokasi dana desa.

Salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal seperti ITDC. Koordinasi yang buruk antara semua pihak ini mengakibatkan banyak proyek pembangunan yang tertunda dan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit di tingkat pemerintah desa juga menjadi kendala dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan yang lambat dan banyaknya aparat desa yang terlibat dalam pengambilan keputusan sering kali memperlambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan.

Faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19, juga turut menghambat pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa. Pandemi ini menyebabkan sebagian besar dana desa dialokasikan untuk program BLT yang mengurangi anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini mempengaruhi kemampuan Desa Kuta dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas kebijakan alokasi dana desa, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam, serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Kuta menghadapi sejumlah tantangan, baik dalam hal efektivitas, kecukupan, maupun responsivitas. Meskipun ada beberapa hasil positif dalam pembangunan, banyak kendala yang perlu diatasi, terutama dalam hal koordinasi antara pihak pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta memperbaiki mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelayanan pendidikan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan madrasah binaannya telah sesuai dengan peran yang dijalankan, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melaksanakan kebijakan pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023. Sebagai dinamisator, lembaga ini berpartisipasi aktif melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, serta monitoring dan evaluasi secara daring maupun langsung untuk mengatasi stagnasi pembangunan sarana prasarana. Sebagai fasilitator, mereka menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan, termasuk memanfaatkan aplikasi SIM-SARPRAS dan SIMPRO SBSN untuk mempercepat penyaluran bantuan. Selain itu, peran dinamisator juga diwujudkan melalui prioritas pembangunan sarana prasarana untuk madrasah terdampak bencana, menggunakan anggaran SBSN. Dari wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan madrasah binaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan target telah terpenuhi, meskipun prosedur masih perlu peningkatan. Penelitian ini mendukung kesimpulan serupa dalam studi sebelumnya oleh Fatlakah dan Ika Devy Pramudiana (2023), yang menyoroti efektivitas pelayanan publik melalui penerapan *e-government* dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan:

1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan madrasah

binaannya diharapkan terus aktif dalam memastikan pemerataan penyaluran program dan bantuan sarana prasarana madrasah agar hasil yang diperoleh dapat maksimal dan tepat sasaran.

- 2) Selain program prioritas untuk kondisi darurat atau terdampak bencana alam, disarankan agar diberikan kesempatan bagi madrasah yang benar-benar membutuhkan untuk menerima bantuan tersebut.
- 3) Pendampingan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan sarana prasarana madrasah sangat diharapkan oleh madrasah binaan sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

REFERENSI

- Abdul, W. S. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurrahman, J. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai di Kantor Pemerintahan. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 112–128.
- Arifin, A. (2021). *Dinamika Komunikasi Masyarakat Kuta Lombok Tengah sebagai Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Studi Antropologi Komunikasi*. Thesis. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 221–232.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Haryani, D. (2023). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan

- Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(1), 173–195.
- Istifazhuddin, A. H. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(1), 315-326.
- Kholif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Thesis*. Universitas Brawijaya.
- Kusuma, A. R. (2017). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 5(2), 112–127.
- Moleong, L. J. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, H. (1990). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, H. (2005). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roidah, I. S. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribis*, 4(1), 39–47.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tuhana, A. S. M., & Daerobi, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25–43.
- Wulan, A. R. (2007). Pengertian dan Esensi Konsep Evaluasi, Asesmen, Tes, dan Pengukuran. *Jurnal FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(2), 235–252.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

